

Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

Indrasuara Luther Sirangi Si'lang¹, Zamruddin Hasid², Priyagus³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: ndras01@gmail.com

²Email: Zamruddin.hasid@feb.unmul.ac.id

³Email: priyagus@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang dianggap dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, yaitu; PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa: (1) PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat; (2) PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; (3) Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; (4) Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; (5) Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; (6) PDRB Sektor Pertanian berpengaruh dominan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci: Indeks pembangunan manusia; pdrb; belanja langsung pemerintah; investasi swasta; tingkat pengangguran terbuka; provinsi sulawesi barat

Analysis on factors affecting to human development index in sulawesi barat province

Abstract

The purpose of this study was to identify factors that can affect to Human Development Index (HDI) at Sulawesi Barat Province. The study used some variables that are considered to affect Human Development Index, such as: Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Agriculture Sector, Government Direct Expenditures, Private Investment, and Unemployment Rate. By using the Multiple Linear Regression Analysis, from the results of this study indicated that : (1) Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Agriculture Sector, Government Direct Expenditures, Private Investment Growth, and Unemployment Rate simultaneously have significant influence on the Human Development Index (HDI) in the Sulawesi Barat Province as much as 0.999, (2) Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Agriculture Sector has positive influence and significant on the HDI of Sulawesi Barat Province; (3) Government Direct Expenditures has positive influence and significant on HDI of Sulawesi Barat Province; (4) Private Investment has positive influence and significant on HDI of Sulawesi Barat Province; (5) Unemployment Rate has negative influence and not significant on the HDI of Sulawesi Barat Province; (6) Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Agriculture Sector has dominant influence on the HDI of Sulawesi Barat Province.

Keywords: Human development index, grdp, government direct expenditures, private investment, unemployment rate, sulawesi barat province

PENDAHULUAN

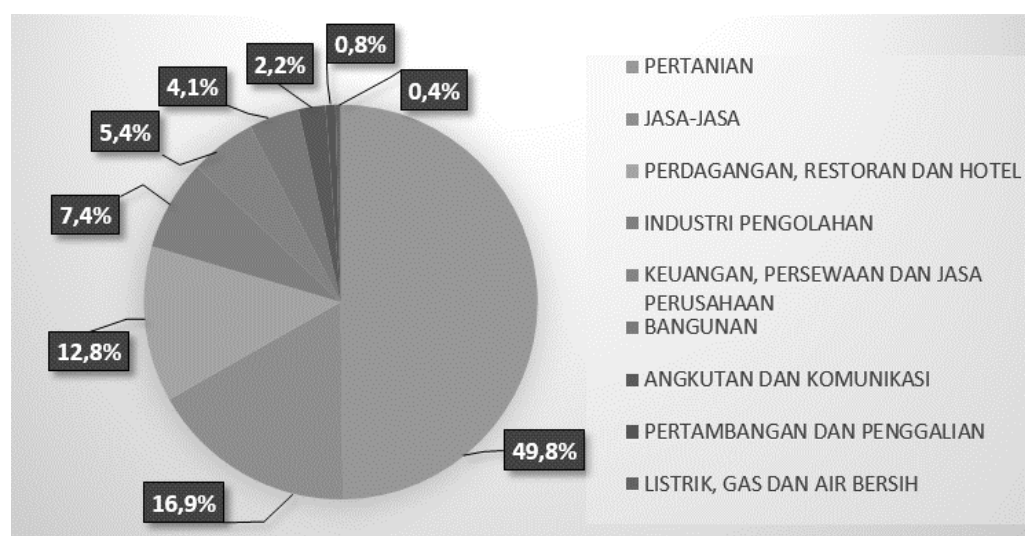
Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, itulah sebabnya dalam perencanaan pembangunan dewasa ini pembangunan manusia senantiasa menjadi fokus utama.

Dalam konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui bahwa hak untuk hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, sebagaimana UUD 1945 mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian manusia adalah titik sentral dari suatu pembangunan dimana manusia adalah subyek dan sekaligus menjadi obyek dari pada pembangunan itu.

Pembangunan manusia menjadi penting dan perlu mendapat perhatian sebab pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup masyarakat secara luas, sehingga keberhasilan pembangunan dewasa ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan Provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004. Provinsi

Sulawesi Barat adalah daerah agraris yang didukung oleh iklim tropis sehingga sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal ini tercermin dari sumbangan sektor pertanian yang hampir mencapai 50 persen dalam pembentukan total PDRB Sulawesi Barat seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Rata-rata Distribusi PDRB Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Sektor Ekonomi

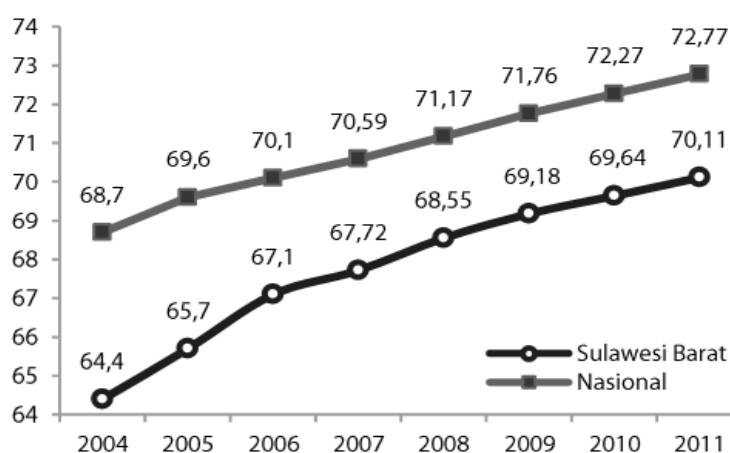
Sumber: Diolah dari data bps-provinsi sulawesi barat

Salah satu masalah mendasar dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Barat adalah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini tercermin dari masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi. Dari tabel 1 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-2011 masih berada dibawah rata-rata IPM provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi.

Tabel 1. Indeks pembangunan manusia (ipm) menurut provinsi di pulau sulawesi tahun 2007-2011

No.	Provinsi	IPM				
		2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sulawesi Utara	74,68	75,16	75,68	76,09	76,54
2	Sulawesi Tengah	69,34	70,09	70,70	71,14	71,62
3	Sulawesi Selatan	69,62	70,22	70,94	71,62	72,14
4	Sulawesi Tenggara	68,32	69,00	69,52	70,00	70,55
5	Gorontalo	68,83	69,29	69,79	70,28	70,82
6	Sulawesi Barat	67,72	68,55	69,18	69,64	70,11

Sumber: BPS provinsi sulawesi barat



Gambar 2. Indeks pembangunan manusia (ipm) provinsi sulawesi barat terhadap nasional

Sumber: Data & Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 IPM Provinsi Sulawesi Barat 70,11 masih berada di bawah IPM Nasional 72,77 dan berada pada peringkat 27 dari 33 Provinsi di Indonesia. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas tentu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas tentu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan alokasi anggaran atas seluruh daya dan dana yang dimiliki daerah untuk meningkatkan seluruh kebutuhan pelayanan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia.

Adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penganggaran pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM.

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi IPM adalah pengangguran. Pembangunan sektor ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan itu adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi.

Penelitian terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah banyak melakukan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Salmani (2013) yang hasil pengujiannya dapat membuktikan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian lain dilakukan oleh Desak Ayu Putu Suciati, dkk (2014) yang dapat membuktikan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Belanja Langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nur Baeti (2013) yang dalam penelitiannya dapat membuktikan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan jenis time series selama periode tahun 2006-2013 yang meliputi data PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Sumber data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Provinsi Sulawesi Barat, berbagai media publikasi, serta lembaga lainnya yang terkait.

Analisis data

Dalam menganalisa data digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu analisis Regresi Linier Berganda dengan persamaan sebagai berikut, Sunyoto (2012):

$$Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Di mana:

Y	= Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
α_1	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
X_1	= PDRB sektor pertanian
X_2	= Belanja langsung pemerintah
X_3	= Investasi swasta
X_4	= Tingkat pengangguran terbuka
ε	= Residu

Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah serta teori-teori yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

PDRB Sektor Pertanian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Belanja Langsung Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Investasi Swasta secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

PDRB Sektor Pertanian berpengaruh dominan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi dari data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, maka dapat dilakukan analisis untuk menjawab perumusan masalah yang telah disusun pada bab sebelumnya. Koefisien determinasi R^2

Tabel 2. Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,999	,997	,07768	2,259

Sumber: Hasil olah data

Besarnya koefisien diterminan R_{square} , atau $R^2 = 0,999$ yang berarti bahwa variable PDRB Sektor Pertanian (X_1), Belanja Langsung Pemerintah (X_2), Investasi Swasta (X_3), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X_4) mampu menjelaskan variable IPM (Y) sebesar 99,90 persen dan besarnya pengaruh variabel lain diluar model yaitu, $1 - 0,999 = 0,001$ atau 0,1 persen

Uji simultan (uji f)

Uji F bertujuan menguji pengaruh secara bersama-sama (simultan) variable independent terhadap variable dependennya.

Tabel 3. Uji anova

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15,341	4	3,835	635,602	,000 ^b
	Residual	,018	3	,006		
	Total	15,360	7			

Sumber: Hasil olah data

Dari hasil Uji ANOVA diperoleh nilai F sebesar 636,602 dan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka tolak hipotesis H_0 . Hasil ini membuktikan bahwa secara bersama-sama PDRB Sektor Pertanian (X_1), Belanja Langsung Pemerintah (X_2), Investasi Swasta (X_3), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X_4) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Sulawesi Barat.

Uji parsial (uji t)

Tabel 4. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	65,010	,352		184,902	,000
	X1_PRDBPertanian	,432	,086	,515	5,035	,015
	X2_BelLangsung	,004	,001	,365	4,060	,027
	X3_Investasi	,081	,025	,193	3,267	,047
	X4_TPT	-,005	,024	-,012	-,224	,837

Sumber: Hasil olah data

Pengujian secara individual yang dihasilkan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Dari Tabel 4. diperoleh nilai statistik t untuk variabel PDRB Sektor Pertanian sebesar 5,035 dengan nilai probabilitas (sig.) = 0,015. Karena nilai sig. $0,015 < 0,05$ maka tolak hipotesis H_0 . Hasil ini membuktikan PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Realisasi Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Dari Tabel 4 diperoleh nilai statistik t untuk variabel Realisasi Belanja Langsung Pemerintah sebesar 4,060 dengan nilai probabilitas (sig.) = 0,027. Karena nilai sig. 0,027 < 0,05 maka tolak hipotesis H₀. Hasil ini membuktikan bahwa Realisasi Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Realisasi Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Dari Tabel 4 diperoleh nilai statistik t untuk variabel Persentase Penduduk Miskin sebesar 3,267 dengan nilai probabilitas (sig.) = 0,047. Karena nilai sig. 0,047 < 0,05 maka tolak hipotesis H₀. Hasil ini membuktikan bahwa Realisasi Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Dari Tabel 4 diperoleh nilai statistik t untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -0,224 dengan nilai probabilitas (sig.) = 0,837. Karena nilai sig. 0,837 > 0,05 maka terima hipotesis H₀. Hasil ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

PDRB Sektor Pertanian berpengaruh dominan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Dari Tabel 4, berdasarkan urutan signifikansi variable independen yang sekaligus menggambarkan dominasi, maka variable PDRB Sektor Pertanian (X₁) yang memberikan pengaruh dominan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Dari persamaan regresi linier tersebut diperoleh persamaan dari Tabel 4. sebagai berikut:

$$Y = 65,01 + 0,432X_1 + 0,004X_2 + 0,081X_3 - 0,005X_4 + 0,001$$

Sig 0,015 0,027 0,047 0,837

Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X₁ = PDRB Sektor Pertanian
- X₂ = Realisasi Belanja Langsung Pemerintah
- X₃ = Realisasi Investasi Swasta
- X₄ = Tingkat Pengangguran Terbuka
- ε = Residu (1-R²)

Nilai konstanta sebesar 65,01 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen dalam model sama dengan nol maka Indeks Pembangunan Manusia adalah 65,01.

Dari hasil analisis data, diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,999. Hal ini secara statistik dapat dikatakan bahwa model yang digunakan sangat baik, karena dari nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan besarnya sumbangan variabel independen (PDRB Sektor Pertanian, Realisasi Belanja Langsung Pemerintah, Realisasi Investasi Swasta dan Tingkat Pengangguran Terbuka) terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia), sehingga koefisien determinasi 0,999 mempunyai arti bahwa sekitar 99,90 persen variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dapat diterangkan oleh variabel PDRB Sektor Pertanian, Realisasi Belanja Langsung Pemerintah, Realisasi Investasi Swasta dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan sisanya 0,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model persamaan regresi berganda.

Mengacu pada teori Haror-Domar dalam Todaro (2006), bahwa tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penduduk memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesejahteraan karena penduduk merupakan subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Penduduk selaku input dalam proses produksi dan sekaligus merupakan tujuan pembangunan itu sendiri yakni untuk ditingkatkan kesejahtraannya.

Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih mengerti dan lebih paham pada kebutuhan dan potensi daerahnya (Kuncoro, 2004). Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah

daerah akan sangat menentukan akselerasi pembangunan ekonomi yang memberi pengaruh pada kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengingatkan pada pembangunan dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi, tetapi dimensi kesehatan dan pendidikan juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental. Kita tidak sependapat bila suatu negara yang mempunyai penduduk berpendapatan tinggi, tetapi tidak berpendidikan, kesehatannya tidak terpelihara dengan baik sehingga harapan hidupnya lebih singkat dari pada penduduk suatu negara yang lain di dunia telah mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dari pada negara yang berpendapatan rendah tetapi usia harapan hidup dan kemampuan baca tulisnya lebih tinggi (Nehen, 2012).

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum secara luas sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 maka diperlukan kebijakan pemerintah yang komprehensif, bukan hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penanganan ketimpangan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, diperlukan kebijakan komprehensif dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Barat. Pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan output di sektor yang dominan seperti sektor Pertanian, kebijakan fiskal melalui Belanja Langsung Pemerintah yang cukup besar, kebijakan dalam upaya menarik investasi serta kebijakan dalam menekan angka pengangguran, terbukti memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh pdrb sektor pertanian terhadap ipm

Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel PDRB Sektor Pertanian mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai koefisien 0,432 yang artinya jika PDRB Sektor Pertanian naik sebesar 1 triliun rupiah maka IPM Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan sebesar 0,432 poin. Dengan demikian hasil ini mendukung hipotesis penelitian yang telah dibuat sebelumnya yang dilakukan oleh Salmani (2013) membuktikan bahwa PDRB Perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kualitas hidup masyarakat (IPM) di Kabupaten Kutai Barat. Hasil ini juga mendukung hipotesis dampak merembes ke bawah (*trickle down effect*) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke pembangunan manusia (Kuncoro, 2006: 38).

PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Dari hasil data juga bisa membuktikan bahwa PDRB Sektor Pertanian adalah merupakan *variable independent* yang dominan memberi pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil ini sejalan dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam usaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia terutama menyamai pencapaian nasional, maka bisa dengan mendorong pertumbuhan produksi sektor Pertanian baik melalui Program Ekstensifikasi maupun Intensifikasi Pertanian. Selain itu dukungan belanja Infrastruktur di bidang pertanian serta usaha penerapan teknologi tepat guna akan sangat membantu dalam peningkatan produksi pertanian di Provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh belanja langsung pemerintah terhadap ipm

Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel Belanja Langsung Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai koefisien 0,004 yang artinya jika Belanja Langsung Pemerintah naik sebesar 1 miliar rupiah, maka IPM Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan sebesar 0,004 poin.

Dengan demikian hasil ini mendukung hipotesis penelitian dan relevan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Baeti (2013) dimana juga membuktikan pengeluaran pemerintah khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nur Isa Pratowo (2011) yang dapat membuktikan Belanja Daerah secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Selain itu dari hasil penelitian menunjukkan bila variable Belanja Langsung Pemerintah menjadi variable kedua yang dominan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat setelah variable PDRB Sektor Pertanian. Hal ini bisa memberikan gambaran bahwa selain peningkatan produksi di Sektor Pertanian, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat mempercepat peningkatan IPM melalui kebijakan fiskal yang tepat dan produktif.

Belanja pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur fasilitas penunjang lainnya di sektor pendidikan jelas memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) yang merupakan indikator dari IPM. Jumlah sekolah pada tahun 2006 meliputi SD, SMP dan SMA sebanyak 1.331 sekolah yang kemudian berkembang menjadi 1.633 sekolah di tahun 2013, atau terjadi pertumbuhan 23 persen dalam kurun waktu tujuh tahun.

Di sektor Kesehatan, penambahan fasilitas kesehatan jelas berpengaruh besar dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHD) yang merupakan indikator dari IPM. Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Tahun 2006 sebanyak 5 dan 66 bangunan yang kemudian Tahun 2013 bertambah masing-masing menjadi 9 Rumah Sakit dan 81 Puskesmas.

Pengaruh investasi swasta terhadap ipm

Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel Investasi Swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai koefisien 0,081 yang artinya jika Investasi Swasta naik sebesar 1 triliun rupiah, maka IPM Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan sebesar 0,081 poin. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis sebelumnya yang dilakukan oleh Desak Ayu Putu Suciati, dkk (2014) yang membuktikan Investasi memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.

. Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar dinyatakan bahwa investasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, artinya bila suatu daerah investasinya rendah maka tingkat pendapatan masyarakat perkapita dan pertumbuhan ekonominya juga rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi demikian sebaliknya (Todaro, 2006). Investasi memberikan peran dalam pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999 : 291). Kenaikan jumlah investasi akan menyebabkan sektor produktif bergerak, yang efeknya akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan Indeks Daya Beli yang bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Meskipun dalam penelitian ini tingkat contribution share dari variable Investasi Swasta hanya 0,193 terhadap IPM tetapi perannya dalam meningkatkan produksi terutama di Sektor Pertanian dan Perkebunan dalam PDRB Provinsi Sulawesi Barat sangat besar mengigit investasi yang ditanamkan di Provinsi Sulawesi Barat hampir 80 persen di sektor ini. Selain itu peningkatan investasi juga berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan penduduk. Peran pemerintah dalam kaitannya dengan Investasi Swasta ini adalah memastikan bahwa investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Barat betul-betul dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, antara lain mampu menyerap tenaga kerja lokal, peningkatan nilai tambah produksi yang dihasilkan, terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi, serta adanya program-program CSR yang bisa langsung dirasakan masyarakat sekitar.

Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ipm

Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai koefisien $-0,005$. Tanda negatif menunjukkan arah berlawanan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan IPM, yang artinya jika Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 1 persen, maka IPM Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan sebesar $0,005$ poin.

Secara teori tingkat pengangguran mempunyai pengaruh berbanding terbalik terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana efek dari pengangguran akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, semakin menurun kesejahteraan masyarakat karena pengangguran maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di karenakan tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Demikian pula sebaliknya, dengan menurunnya tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan memberi pengaruh terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam penelitian ini, meskipun secara arah pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat sudah sesuai dengan teori namun hasilnya tidak signifikan. Hasil ini tidak mendukung hipotesis karena tingkat pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Baeti (2013) dimana dapat membuktikan tingkat pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah.

Tidak signifikannya pengaruh tingkat pengangguran terhadap IPM dalam penelitian ini kemungkinan disebabkan kenaikan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat dominan terjadi pada sektor yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan bukan pada sektor-sektor dengan garis kesejahteraan masih rendah seperti sektor pertanian.

Agar tingkat pengangguran terbuka dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi terutama di sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan perkebunan, salah satunya dengan cara menggandeng pihak investor / perusahaan swasta. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa PDRB Sektor Pertanian adalah variable yang memiliki dominasi tertinggi berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja di sektor Pertanian maka akan semakin meningkatkan PDRB sektor pertanian yang selanjutnya memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian yang telah dibuat.

PDRB Sektor Pertanian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat. PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Belanja Langsung Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat. Belanja Langsung Pemerintah sebagai bentuk kebijakan fiskal akan mampu mempercepat kenaikan IPM melalui penambahan nilai belanja langsung maupun efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih terarah pada sektor dan program-program yang produktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Investasi Swasta secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan Investasi akan menyebabkan sektor produktif bergerak, yang efeknya akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan Indeks Daya Beli yang bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat. Tidak signifikannya pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap IPM disebabkan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat didominasi dari sektor pertanian yang mencapai 57 persen.

PDRB Sektor Pertanian berpengaruh dominan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat, STIE YKPN Yogyakarta.
- Baeti, Nur, 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2011. *Economics Development Analysis Journal*. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- Bigith V.B, 2013, *Human Development Indicators*, University of Mysore
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi pertama. Cetakan Keenam, BPFE. Yogyakarta.
- Desak Ayu Putu Suciati, dkk, 2014. Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Bali.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2009. *Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gujarati, 2003. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga, Jakarta
- Jhingan, M.L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (terjemahan oleh D. Guritno). PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Mulyadi, S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nur Isa Pratowo, 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*, *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, Universitas Sebelas Maret. Solo.
- Nehen, I.K. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Ray, Debraj, 1998, *Development Economics*, Princeton University Press, New Jersey
- Salmani, 2013. *Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Barat*. Tesis Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Setiaji, Bambang, 2004, *Panduan Riset Dengan Pendekatan Kuantitatif*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Setiono NS. Dedi, 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah : Teori dan Analisis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Bima Grafika, Jakarta.
- Sumarsono, S. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta
-

- Tarigan, Robinson, 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Medan.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan, Jilid 1. Haris dan Puji (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, Edisi Pertama. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.